

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pengadaan Tanah 2018 Tuai Sorotan

### Kasus Lahan Cengkareng Era Ahok Jangan Terulang

JAKARTA - Sejumlah pihak mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk berhati-hati dalam pengadaan tanah. Terlebih, dana yang dianggarkan mencapai triliunan rupiah dalam RAPBD DKI tahun 2018.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad, mengatakan pengadaan tanah oleh empat SKPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, dan Dinas Kehutanan senilai Rp 4,93 triliun lebih.

"Anggaran dari penyempurnaan KUA-PPAS 2018 sebesar Rp 2,99 triliun setelah input hasil pembahasan Banggar DPRD naik sebesar Rp 1,94 triliun sehingga menjadi Rp 4,93 triliun kami anggap sangatlah besar, sehingga pengelolaannya harus hati-hati," ujar Syaiful, Minggu (10/12).

Dari hasil penelusuran Jakarta Public Service (JPS), hanya usulan dari Dinas Bina Marga yang menyertakan lokasi tanah yakni 20 lokasi. Sementara tiga SKPD lain anggarannya gelondongan dan naik fantastis tanpa menyebutkan lokasi tanah yang akan dibebaskan.

Usulan pengadaan tanah yang tidak menyertakan lokasi menandakan perencanaan yang buruk, berpotensi terjadi penyimpangan, dan potensi tidak terserap sehingga menjadi SILPA. Anggaran pengadaan tanah seharusnya menjadi bahan

Kemendagri dalam mengevaluasi RAPBD 2018 dan jika dianggap tidak sesuai dibatalkan saja. "Kita tentunya berharap kasus pembelian tanah seperti RS Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dan Cengkareng Barat senilai Rp 668 miliar tidak terulang kembali," terang Syaiful.

Seperti diketahui, pada saat masa kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) muncul kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare oleh Pemprov DKI. Diduga kasus itu sebagai bentuk kebijakan lost anggaran. Pengadaan lahan yang langsung didisposisi oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada 10 Juli 2015 itu, milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.

Kisruh pembelian lahan senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI pada 2016. Pembelian lahan tersebut menggunakan anggaran APBD 2015.

Namun, Mahkamah Agung (MA) kemudian menetapkan tanah itu milik Dinas KPKP DKI. Disposisi pembelian lahan, langsung dari Gubernur ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perumahan.

Pembelian bermasalah tak hanya setelah transaksi dilakukan pada

November 2015. Penduduk setempat juga memprotes sejak awal, sampai-sampai Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI sebagai pembeli, mengundang mereka pada 1 Oktober 2015.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Sandiaga Uno menyatakan, Pemprov DKI telah melayangkan surat tagihan kepada pihak ketiga dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. "Kelanjutannya kemarin kami melakukan proses hukum, upaya penagihan kepada pihak ketiga," jelas Sandi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu menjelaskan, penagihan tersebut berdasarkan rekomendasi dari BPK agar memperbaiki keuangan. Setelah kerugian negara sebesar Rp 668 miliar tersebut dibayar, pihaknya akan melakukan langkah teknis yang lebih detail.

Menurut dia, setelah disisir, kasus pembelian tanah di Cengkareng dan Sumber Waras, merupakan tanah milik pemprov sendiri. Namun, dibeli pemprov kembali. "Tentu, saya sangat terenyuh. Kami akan perbaiki sistem. Salah satunya adalah pencegahan korupsi," tandas dia. (wok)

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pengadaan Tanah 2018 Tuai Sorotan



- 1 Prinsip tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2 Efisien, ekonomis dan efektif
- 3 Bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
- 4 Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- 5 Transparan, memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi
- 6 Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.

Kita tentunya berharap kasus pembelian tanah seperti RS Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dan Cengkareng Barat senilai Rp 668 miliar tidak terulang kembali”.

**M Syaiful Jihad**

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service